

ANALISIS STAKEHOLDER DALAM PROSES IMPLEMENTASI PROGRAM GENERASI BERENCANA (GENRE) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KOTA SURAKARTA

Daniella Venidomine Widiananda, Desiderius Priyo Sudibyo

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Sebelas Maret

email: daniellvenidomine@student.uns.ac.id

Abstrak

Perkawinan anak merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan. Perkawinan anak merupakan permasalahan serius yang dapat mengancam hal-hak anak. Untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, Pemerintah Indonesia dan khususnya Pemerintah Daerah Kota Surakarta telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan mengimplementasikan program Generasi Berencana (GenRe). Upaya yang dilakukan tentu membutuhkan campur tangan berbagai pihak atau stakeholders. Dalam penelitian ini akan dilihat siapa saja *stakeholders* yang berperan dalam proses implementasi Program Generasi Berencana, dan bagaimana peran dari *stakeholder* dalam proses implementasi tersebut. Penelitian ini akan menggunakan teori dari Charles O Jones tentang proses implementasi kebijakan, yang meliputi pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan. Dalam menganalisis peran *stakeholder*, penelitian ini mengadopsi matriks dari Reed, et al yang mengklasifikasikan *stakeholders* kedalam empat kelompok yakni *subject*, *key player*, *context setter*, dan *crowd*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, data yang digunakan adalah data yang berupa kata-kata, kalimat yang dapat menggambarkan situasi sebenarnya.

Kata Kunci: Pemangku Kepentingan, Implementasi, Generasi Berencana,

Abstract

Child marriage is a problem that has yet to be resolved. Child marriage is a serious problem that can threaten the rights of children. To prevent child marriage, the Government of Indonesia and especially the Regional Government of Surakarta City has made various efforts, one of which is by implementing the Generation Planning (GenRe) program. The efforts made certainly require the intervention of various parties or stakeholders. In this study, it will be seen who are the stakeholders who play a role in the implementation process of the Generation Planning Program, and how the role of stakeholders in the implementation process is. This study will use the theory of Charles O Jones about the policy implementation process, which includes organization, interpretation, and implementation. In analyzing the role of stakeholders, this study adopts a matrix from Reed et al which classifies stakeholders into four groups, namely subject, key player, context setter, and crowd. The method used in this research is descriptive

qualitative method. In qualitative research, the data used is data in the form of words, sentences that can describe the actual situation

Keywords: Stakeholder, Implementation, Generasi Berencana

Pendahuluan

Usia perkawinan telah diatur didalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian mengalami pembaharuan yang tertera dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu batas usia perkawinan untuk laki – laki dan perempuan adalah usia 19 (Sembilan belas) tahun. Meski begitu, diberlakukannya Undang-Undang tersebut tidak lantas membuat praktik perkawinan anak menjadi tak lagi dilakukan masyarakat. Pada kenyataannya, justru dispensasi perkawinan untuk perkawinan anak di bawah umur yang di pencatatan telah mengalami lonjakan dan peningkatan secara drastis setelah diberlakukannya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini diungkapkan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi Moch. Sukkri (www.komisiyudisial.go.id).

Unicef mengatakan bahwa ada 1.220.900 anak di Indonesia sudah melakukan perkawinan. Angka ini tergolong cukup tinggi dan menduduki peringkat ke-10 secara global. Berdasarkan data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan (komnasperempuan.go.id, 2021:68), jumlah dispensasi perkawinan anak terus meningkat sejak tahun 2016 hingga 2020 dan mengalami lonjakan yang cukup signifikan semenjak pandemi. Di provinsi Jawa Tengah, angka perkawinan anak juga mengalami lonjakan yang drastic selama masa pandemi. Pada tahun 2019 tercatat terdapat 2.049 kasus pernikahan anak di Jawa Tengah. Angka ini melonjak menjadi 12.972 kasus pernikahan anak selama tahun 2020, dengan perincian jumlah anak laki – laki 1.671 anak dan anak perempuan 11.301 anak . (tribunnews.com) Angka perkawinan anak ini mulai berkurang di tahun 2021 menjadi sebanyak 8.700 kasus. (detik.com) . Salah satu kota dengan kasus perkawinan anak dengan jumlah yang cukup tinggi yaitu adalah Kota Surakarta. Data terbaru menunjukkan bahwa pada bulan April 2022 hingga Juni 2023, terdapat sebanyak 158 kasus perkawinan anak yang terjadi. Dari 158 kasus tersebut, terdapat 1 anak berusia 13 tahun, 1 anak berusia 14 tahun, 7 anak berusia 15 tahun, 20 anak berusia 16 tahun, 47 anak berusia 17 tahun, dan 82 anak berusia 18 tahun (Puspaga Kota Surakarta, 2023).

Adanya perkawinan anak dapat menandakan bahwa adanya hak – hak anak yang tidak terpenuhi sesuai dengan yang tertuang dalam Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Anak. Selain itu, hak – hak anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi". Dalam hal ini, penetapan dan pemenuhan hak untuk bermain, bersosialisasi, dan menempuh pendidikan setinggi-tingginya seringkali tidak dapat terpenuhi ketika seorang anak melakukan pernikahan dini. Ketika seorang anak melakukan pernikahan dini, seringkali hal itu mengharuskannya untuk berhenti menempuh pendidikan formal. Hal ini juga didukung dengan data seperti yang dimuat dalam penelitian yang dilakukan Alfenina (2022:7), bahwa di Kota Surakarta sebanyak 58 dari 128 anak yang melakukan pernikahan dini memiliki latar belakang pendidikan hanya sampai jenjang tamat SMP, dan setelah pandemi dari 190 anak yang melakukan pernikahan dini, 106 diantaranya merupakan tamatan SMP. Hal ini menjadi sebuah keprihatinan bahwa seorang anak tidak dapat melanjutkan pendidikan formalnya di sekolah karena memilih melakukan pernikahan dini.

Selain berpengaruh dalam hal pemenuhan hak-hak anak, perkawinan anak dapat memunculkan berbagai dampak (puspensos.kemensos.go.id). Dalam keilmuan biologi, perkawinan yang terjadi pada anak biasanya akan memberikan dampak atau pengaruh bagi kondisi biologis, khususnya bagi perempuan. Anak-anak perempuan yang mengandung atau hamil dan setelah itu melahirkan pada usia yang belum matang, memiliki resiko lebih tinggi bagi kesehatan, baik untuk kesehatan ibu maupun kesehatan bayi. Perempuan yang melahirkan di usia yang belum mencapai 20 tahun dapat beresiko kematian pada bayi, atau berpotensi rendahnya berat bayi pada saat baru lahir akibat organ reproduksi ibu yang belum cukup matang. Menurut Walgito (2000:20), dalam hal psikologis, pernikahan yang dilakukan di usia yang terlalu muda dengan psikologis yang belum matang, dapat berpotensi memicu permasalahan yang tidak diharapkan. Hal ini dapat berakibat hingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Banyak perempuan yang melakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dengan persentase 44%. Dalam hal pendidikan, tidak banyak dari anak yang melakukan perkawinan anak dapat melanjutkan pendidikan, karena berbagai faktor yang mendasarinya, mereka tidak dapat melanjutkan atau memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya.

Untuk mengatasi permasalahan perkawinan usia anak, diperlukan adanya campur tangan berbagai pihak mulai dari pemerintah, swasta, keluarga, dan masyarakat umum. Dalam Pemerintahan Kota Surakarta, usaha untuk mencegah dan mengurangi terjadinya praktik perkawinan anak dilakukan oleh beberapa pihak seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Forum GenRe, Forum Anak, dan lain-lain. Salah satu program yang dilakukan di Kota Surakarta dalam rangka meminimalisir terjadinya perkawinan anak adalah melalui Program Generasi Berencana (GenRe).

Penelitian ini akan berfokus pada implementasi program GenRe serta siapa dan bagaimana peran para stakeholder dalam implementasi tersebut. Program GenRe sendiri merupakan suatu usaha yang diinovasikan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi adolescents atau mahasiswa yang diarahkan untuk mencapai Tegar Remaja atau Mahasiswa agar menjadi Tegar Keluarga demi terbentuknya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Dalam penelitian ini akan digunakan teori tahapan implementasi dari Charles O. Jones yang menyebutkan bahwa terdapat 3 aktivitas atau tahapan dalam proses implementasi kebijakan, yakni Pengorganisasian, Interpretasi, dan Penerapan (Aplikasi). Kemudian di dalam setiap tahapan tersebut, akan dilakukan analisis stakeholder berdasarkan pendapat dari Reed (2009) yang mengklasifikasikan stakeholder kedalam 4 kelompok berdasarkan tinggi rendahnya kepentingan dan pengaruh yang diberikan. Keempat kelompok tersebut yakni Key Player, Subject, Context Setter, dan Crowd.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni-Oktober tahun 2023. Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kota Surakarta. Kota Surakarta termasuk salah satu kota yang melaksanakan program GenRe di bawah koordinasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui wawancara kepada para informan dan observasi implementasi program GenRe. Sedangkan sumber data sekunder meliputi buku, berita, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan program GenRe yang dapat membantu dalam penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, akan digunakan uji validitas dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan teori dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Program GenRe dilaksanakan sebagai realisasi dari Pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Berkeluarga. BKKBN mengembangkan Program GenRe bagi remaja dan keluarga yang memiliki remaja, dan diatur dalam Peraturan Kepala BKKBN NO.47/Hk/010 B5/2010 tentang rencana strategi BKKBN 2010-2014.

Berdasarkan temuan hasil wawancara, diketahui bahwa Program GenRe yang dilaksanakan di Kota Surakarta adalah turunan dari Program GenRe yang dicetuskan oleh BKKBN.

Dalam proses implementasi program GenRe di Kota Surakarta, *stakeholder* yang terlibat dan akan dibahas dalam penelitian ini yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sebagai penanggung jawab program, Forum GenRe, Duta GenRe, dan PIK-R sebagai pelaksana, dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sebagai pembina dari PIK-R. Di Kota Surakarta, terdapat 66 PIK-R yang terdapat di berbagai kelurahan, dan dibina oleh beberapa PKB di setiap kelurahan. Dalam penelitian ini, diambil 2 sampel PIK yakni PIK Remaja Joyotakan dan PIK Cakra dari Universitas Sebelas Maret, serta PKB Pucangsawit sebagai pembina dari PIK-R Joyotakan.

1. Pengorganisasian

Menurut Charles O Jones, pengorganisasian merupakan tahap pertama dalam implementasi kebijakan, dimana tahap ini merupakan tahapan untuk menata sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat membuahkan hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari kebijakan.

a. Sumber Daya

Sumber daya terdiri dari beberapa hal seperti sumber daya manusia yang menjalankan kebijakan, kemudian sumber daya finansial berupa anggaran yang digunakan untuk mendanai jalannya kebijakan, dan sumber daya sarana prasarana atau fasilitas yang dimiliki untuk menunjang terlaksananya kebijakan. Ketiga sumber daya ini merupakan hal yang penting sehingga perlu dilihat apa saja sumber daya yang dimiliki stakeholder dalam program GenRe, dan bagaimanakah sumber daya tersebut dimanfaatkan.

Terkait sumber daya dalam pelaksanaan Program GenRe, DP3AP2KB menyebutkan bahwa pihaknya memiliki ketiga sumber daya pokok tersebut. Namun dalam hal ini DP3AP2KB lebih berperan sebagai penyalur dan penyedia sumber daya bagi unit-unit dibawahnya terutama bagi Forum GenRe, Duta GenRe, dan PIK-R wilayah. DP3AP2KB memiliki sumber daya finansial yang bersumber dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah, dan kemudian didistribusikan atau diberikan kepada unit-unit dibawahnya Selain itu, DP3AP2KB juga menyediakan sumber daya sarana-prasarana yang dibutuhkan seperti sekretariat, buku pedoman, poster, kamera, laptop, printer, buku administrasi PIK-R, dll.

Forum GenRe dan Duta GenRe juga mengkonfirmasi bahwa sebagian besar sumber daya yang dimilikinya merupakan pemberian

dari DP3AP2KB, yakni sumber daya finansial dan sumber daya sarana prasarana. Selain sumber daya yang berasal dari DP3AP2KB, terdapat sumber daya lain yang dimiliki Forum GenRe dan Duta GenRe seperti sumber daya manusia. Forum GenRe memiliki anggota aktif sebanyak 20 orang, dan Duta GenRe memiliki beberapa tim yang dapat membantunya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam Program GenRe.

Terkait sumberdaya, PIK-R juga mendapatkan anggaran yang salah satunya berasal dari DP3AP2KB. Selain itu, PIK-R wilayah, yang dalam hal ini adalah PIK-R Joyotakan, juga mendapatkan dana dari sumber lain yakni dana hibah PKK, dan dana mandiri dari anggota PIK-R. Dalam hal sumber daya manusia, PIK-R Joyotakan memiliki 60 orang anggota dan 12 orang pengurus. PIK-R Jotokatakan memiliki sekretariat dan beberapa fasilitas penunjang seperti *e-book*, modul, dan perangkat permainan untuk menunjang kegiatan yang dilakukan. Di sisi lain, PIK-R Cakra UNS memiliki sumber daya finansial tambahan, yakni berasal dari pihak Universitas sebab PIK-R Cakra UNS termasuk dalam salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa yang ada di UNS. Dalam hal sumber daya manusia, PIK-R Cakra UNS memiliki 78 anggota yang dibagi ke dalam beberapa divisi untuk melaksanakan tugasnya.

Stakeholder selanjutnya yakni PKB, memiliki sumber daya finansial yang berasal dari BKKBN dan kemudian disalurkan melalui OPD. PKB terdiri dari berbagai kategori atau jenjang jabatan, yakni Jabatan Fungsional Keahlian yang terdiri dari Ahli Utama, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, serta Jabatan Fungsional Keterampilan yang terdiri dari Penyelia, Mahir, Terampil, dan Pemula. Dalam hal sumber daya sarana prasarana, PKB memiliki beberapa fasilitas yang dapat digunakan yakni sekretariat dan KIT edukasi yang dapat digunakan saat pelaksanaan kegiatan. Namun fasilitas ini tidak digunakan langsung oleh PKB, melainkan disalurkan pada PIK-R yang ada di wilayahnya.

b. Unit-Unit

Dalam proses implementasi Program GenRe di Kota Surakarta, struktur yang ada terdiri dari DP3AP2KB sebagai penanggung jawab, kemudian Forum GenRe dan Duta GenRe, serta terdapat PKB yang merupakan jabatan fungsional yang membina PIK-R di setiap wilayah kelurahan. Peran DP3AP2KB sebagai penanggung jawab Program GenRe di Kota Surakarta diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Secara lebih spesifik, Program GenRe di Kota Surakarta menjadi tanggung jawab dari Bidang Kesejahteraan Keluarga.

Dalam pelaksanaannya tak jarang DP3AP2KB melibatkan kemitraan dengan pihak-pihak diluar struktur yang dapat membantu terlaksananya kegiatan, seperti misalnya Dinas Kesehatan, BNN, Universitas, dan lembaga lainnya.

Selain DP3AP2KB, Forum GenRe Kota Surakarta juga menjadi salah satu unit yang ada dalam struktur. Keterlibatan Forum GenRe dalam implementasi Program GenRe Kota Surakarta dikukuhkan dalam Surat Tugas Nomor KP. 11.00/54/I/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala DP3AP2KB Kota Surakarta. Dalam melaksanakan tugasnya, Forum GenRe berpedoman pada AD-ART GenRe Surakarta yang didalamnya termuat fungsi, tugas, hak, dan kewajiban dari Forum GenRe.

Duta GenRe menjadi salah satu stakeholder yang memiliki peran penting dalam implementasi Program GenRe di Kota Surakarta. Dalam situs resmi milik DP3AP2KB yakni dp3ap2kb.surakarta.go.id disebutkan bahwa “Duta GenRe adalah sebuah wadah untuk mengembangkan pembentukan karakter bangsa yang harapannya dapat menyebarkan virus kebaikan yang berkaitan dengan generasi berencana di kalangan generasi muda secara menyeluruh.” Lebih lanjut, dalam publikasi yang dikeluarkan di kanal surakarta.go.id dijelaskan bahwa salah satu tugas Duta GenRe terpilih adalah sebagai agen informasi tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan, informasi kesehatan reproduksi yang sehat, tentang bahaya napza, serta pentingnya remaja memiliki keterampilan hidup untuk masa depan yang lebih baik. Legalitas Duta GenRe dalam implementasi Program GenRe di Kota Surakarta tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta Nomor KB 27/3032/VI/2022 Tentang Apresiasi Duta GenRe Tingkat Kota Surakarta.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Forum GenRe Surakarta dan Duta GenRe Surakarta merupakan mitra yang bergerak bersama dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dalam kaitannya dengan implementasi Program GenRe di Kota Surakarta.

Selanjutnya, PIK-R merupakan stakeholder yang bergerak di wilayah paling kecil yakni di setiap kelurahan. Dalam wawancara yang dilakukan dengan narasumber, diketahui bahwa setiap PIK-R merupakan bagian dari Forum GenRe. Di Kota Surakarta, PIK R merupakan wadah bagi remaja di tingkat kelurahan dan kini terdapat 66 kelurahan di Kota Surakarta yang memiliki PIK R. Sedangkan PIK Mahasiswa merupakan PIK yang berada di lingkup universitas, dan di

Kota Surakarta hanya terdapat beberapa universitas yang memiliki PIK sebagai salah satu unit kegiatan mahasiswanya.

Secara Nasional, regulasi mengenai PIK diatur dalam Peraturan Kepala BKKBN No 88/PER/F2/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa, sedangkan legalitas masing-masing PIK diatur sesuai daerah teritorial masing-masing. Pada PIK R Joyotakan, surat keputusan dikeluarkan oleh Kelurahan Joyotakan, yakni pada Surat Keputusan Kepala Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor: MD.011/I/2023 yang berlaku sejak tahun 2023 hingga 2026. Sedangkan pada PIK Cakra UNS, legalitas dikeluarkan oleh pihak universitas yakni melalui Surat Keputusan Pusat Informasi dan Konseling Remaja Cakra UNS Nomor: 14/UN27/C/SK/PIK-UNS/III/2023 Tentang Laporan Struktur Organisasi UKM PIK-R Cakra UNS.

Lebih lanjut, Program GenRe yang dilakukan di Kota Surakarta tidak lepas dari adanya bantuan dan pengawasan dari beberapa pihak, salah satunya yakni oleh Pengawas Keluarga Berencana (PKB). PKB adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. Di Kota Surakarta, PKB bergerak di wilayah kelurahan untuk membantu dan mengawasi jalannya program-program BKKBN, termasuk program GenRe.

PKB berjalan dengan dasar hukum yakni Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, dan juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

c. Metode Pelaksanaan

Dalam implementasi program GenRe di Kota Surakarta, kebijakan dilaksanakan dengan membagikan modul dan kemudian dilanjutkan dengan pemberian sosialisasi. Dalam wawancara dengan beberapa

narasumber, disebutkan bahwa seringkali terdapat modul yang diberikan oleh BKKBN. Modul tersebut dibagikan dengan 2 cara, yakni disalurkan melalui DP3AP2KB, atau diberikan langsung oleh BKKBN Provinsi Jawa Tengah pada kegiatan sosialisasi atau *Training of Trainers* (ToT) yang biasanya mengundang Forum GenRe atau Duta GenRe.

Dalam pelaksanaan *workshop* atau ToT yang diadakan oleh BKKBN, DP3AP2KB berperan sebagai penghubung antara BKKBN dengan Forum GenRe dan Duta GenRe yang menjadi pelaksana di tingkat kota. Modul dan materi yang diberikan pada Forum GenRe dan Duta GenRe saat *workshop* atau ToT biasanya beragam, tergantung pada isu apa yang sedang diangkat oleh BKKBN Pusat. Modul dan materi inilah yang nantinya akan menjadi bekal bagi Forum GenRe dan Duta GenRe untuk dapat menyebarluaskan dan melaksanakannya di kotanya masing-masing.

Setelah mendapatkan pelatihan dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Forum GenRe dan Duta GenRe memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelatihan dan edukasi pada PIK yang ada di kotanya masing-masing. Pelatihan ini biasanya diadakan dalam bentuk ToT dan/atau sosialisasi yang dikoordinasikan oleh DP3AP2KB dan Forum GenRe dengan mengundang seluruh PIK dari masing-masing wilayah, serta Forum GenRe dan Duta GenRe sebagai pengisi atau pelatih dalam kegiatan tersebut.

Dalam proses ini, PKB berperan sebagai pendamping teknis bagi PIK-R setelah mendapatkan bekal dari Forum GenRe dan Duta GenRe dalam pelatihan tersebut, serta membantu PIK-R dalam melakukan kemitraan dengan pihak lain.

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisa yang dilakukan pada tahap pengorganisasian yang menjadi awal dari proses implementasi Program GenRe maka dapat ditarik kesimpulan terkait peran dari setiap *stakeholder* yang terlibat didalamnya. Dalam tahap pengorganisasian, DP3AP2KB mengambil peran sebagai *Key Player* sebab DP3AP2KB merupakan penanggung jawab dalam pelaksanaan Program GenRe di Kota Surakarta, dimana ini ditunjukkan dalam peranan yang dilakukannya. DP3AP2KB sebagai penanggung jawab di tingkat kota merupakan perpanjangan tangan dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah, sehingga semua anggaran atau sumber daya finansial dan beberapa sumber daya lainnya seperti modul, disalurkan melalui DP3AP2KB. Selain itu DP3AP2KB juga menyediakan sumber daya lain yang dapat menunjang keberhasilan Program GenRe seperti misalnya pengadaan

ruang sekretariat. Lebih lanjut, DP3AP2KB juga bertugas mengkoordinir Forum GenRe dan Duta GenRe sebagai unit pelaksana dibawahnya, dan juga berkoordinasi dengan PKB terkait pembinaan terhadap PIK-R di wilayah kelurahan.

Stakeholder lainnya yakni Forum GenRe, Duta GenRe dan PIK-R memiliki peran yang sama dalam tahap pengorganisasian yakni berperan sebagai *Subject*, yang berarti Forum GenRe, Duta GenRe, dan PIK-R memiliki kepentingan yang tinggi namun mempunyai pengaruh yang rendah. Kepentingan yang tinggi ini dapat dilihat dari kesiapsediaan Forum GenRe, Duta GenRe, dan PIK-R untuk mengerahkan sumber daya yang dimilikinya untuk melaksanakan setiap tugas yang diberikan. Dalam hal ini Forum GenRe dan Duta GenRe harus siap mengikuti ToT di tingkat Provinsi, dan PIK-R harus siap mengikuti kegiatan pelatihan yang diadakan DP3AP2KB. Meski begitu Forum GenRe, Duta GenRe, dan PIK-R tidak memiliki pengaruh yang besar dalam tahap pengorganisasian karena merupakan unit pelaksana yang ada di bawah DP3AP2KB, sehingga tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan yang substansial.

Kemudian, dalam tahap pengorganisasian ini PKB juga mengambil peran sebagai *Subject*, yang artinya PKB memiliki kepentingan yang tinggi namun mempunyai pengaruh yang rendah, PKB memiliki kepentingan yang tinggi sebab PKB merupakan pegawai dari BKKBN yang berada di daerah, Ini berarti PKB memiliki kepentingan untuk memastikan terpenuhinya segala sumber daya yang diperlukan oleh unit pelaksana. Meski begitu, PKB tidak memiliki pengaruh yang besar sebab dalam PKB merupakan sebuah jabatan fungsional yang tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan di tingkat kota.

2. Interpretasi

Tahap interpretasi yang dilakukan dalam proses implementasi Program GenRe di Kota Surakarta dapat dilihat dari siapa stakeholder yang memiliki kewenangan untuk membuat bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan, berikut dengan petunjuk pelaksanaannya dan sekaligus memberikan perintah pada unit dibawahnya. Kemudian, bagaimana hal-hal teknis tersebut disampaikan juga menjadi poin yang tidak kalah penting, sebab dapat menandakan apakah terjalin komunikasi yang baik diantara para stakeholder yang terlibat.

Setelah DP3AP2KB, Forum GenRe dan Duta GenRe mendapatkan arahan dan pelatihan dari BKKBN Provinsi, pada tahap selanjutnya yakni interpretasi, seperti apa skema kegiatan yang akan dilakukan merupakan

hak dari masing-masing daerah. Hal ini dilakukan agar kegiatan yang dilakukan dapat disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah.

Pada tahap interpretasi dilakukan brainstorming dan diskusi untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan. Diskusi ini dilakukan oleh Forum GenRe dan Duta GenRe dengan DP3AP2KB. Dalam tahap ini, Forum GenRe dan Duta GenRe mengajukan rancangan kegiatan yang akan dilakukan, dan kemudian rancangan kegiatan ini akan ditinjau bersama dengan DP3AP2KB. Disini DP3AP2KB selaku penanggung jawab memiliki kewenangan untuk menyetujui, menolak, merevisi, memberikan arahan, dan menambahkan apabila rancangan kegiatan dirasa kurang sesuai. Setelah skema kegiatan dibuat dan disetujui oleh DP3AP2KB, selanjutnya Forum GenRe akan mengundang PIK perwakilan setiap PIK wilayah untuk mengikuti sosialisasi. Selain mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Forum GenRe, PIK-R juga diwajibkan mengadakan kegiatan di wilayahnya masing-masing. Berdasarkan wawancara dengan PIK-R Joyotakan, didapati bahwa dalam merumuskan program kerja yang akan dilakukannya, PIK-R terlebih dulu melakukan pembahasan di internal organisasinya lalu meminta persetujuan dari kelurahan, untuk kemudian diajukan ke DP3AP2KB bersama dengan kelompok lain di dalam kelurahan tersebut. PIK-R Cakra UNS menyampaikan pernyataan yang sedikit berbeda dimana program kerja yang dilakukannya merupakan program tahunan sehingga hanya perlu berkonsultasi dengan pendamping PIK-R Cakra UNS.

Selanjutnya, PKB sebagai pembina dari PIK-R juga menerima instruksi dan melakukan koordinasi dengan DP3AP2KB terkait program kerja atau kegiatan yang akan dilakukan di wilayahnya. Biasanya hal ini dilakukan dalam rapat koordinasi atau melalui surat resmi.

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang dilakukan pada tahap interpretasi, dapat diketahui bahwa DP3AP2KB masih berperan sebagai *Key Player* sebab dalam tahap ini DP3AP2KB memiliki kepentingan dan pengaruh yang besar. Disini DP3AP2KB memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa program kerja atau kegiatan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan arahan dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah, terutama dalam hal administrasi dan penganggaran. DP2AP2KB juga memiliki pengaruh yang besar, dimana DP3AP2KB berwenang untuk menyetujui, menolak, merevisi, memberikan arahan, dan menambahkan apabila rancangan kegiatan dirasa kurang sesuai.

Dalam tahap ini, Forum GenRe dan Duta GenRe berperan sebagai *Subject* karena memiliki kepentingan yang tinggi namun tidak memiliki pengaruh yang besar. Kepentingan dari Forum GenRe dan Duta GenRe ditunjukkan dari adanya komunikasi dan konsultasi yang berkelanjutan

antara Forum GenRe dan Duta GenRe dengan DP3AP2KB untuk membahas mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari pertemuan atau pelatihan yang diberikan oleh BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Meski begitu, Forum GenRe dan Duta GenRe tidak memiliki pengaruh yang besar pada tahap interpretasi sebab Forum GenRe dan Duta GenRe merupakan unit yang berada di bawah DP3AP2KB sehingga segala pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan sepihak melainkan harus tetap berdasarkan persetujuan DP3AP2KB.

PIK-R juga berada dalam posisi yang tidak jauh berbeda dengan Forum GenRe dan Duta GenRe, dimana PIK-R yang dalam hal ini adalah PIK-R Joyotakan dan PIK Cakra UNS, juga berperan sebagai *Subject*. Kepentingan yang tinggi dilihat dari keikutsertaan PIK-R dalam mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh DP3AP2KB dan Forum GenRe, serta adanya komunikasi dan konsultasi yang dilakukan dengan pihak internal dan eksternal kelompok terkait program kerja yang akan dilaksanakan. Meski begitu PIK-R tidak memiliki pengaruh yang besar pada tahap interpretasi ini, sebab PIK-R merupakan unit terbawah dimana pihaknya tidak memiliki wewenang mutlak untuk memutuskan program kerja yang akan dilaksanakan. PIK-R perlu melakukan konsultasi dan kemudian mengajukan rencana kegiatan tersebut pada unit di atasnya, yakni kelurahan atau pendamping universitas, untuk mendapatkan persetujuan.

Selanjutnya, dalam tahap interpretasi PKB berperan sebagai *Crowd* yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah. Hal ini dikarenakan pada tahap ini PKB hanya berperan sebagai penyalur atau penghubung antara DP3PA2KB dengan PIK-R di wilayah. PKB akan melakukan rapat koordinasi atau menerima surat dari DP3AP2KB, dan kemudian disampaikan kepada PIK-R di wilayah untuk ditindaklanjuti dan dibuat rancangan program kerja. Selain itu PKB tidak ikut serta atau terlibat dalam proses sosialisasi atau penyampaian materi yang dilakukan oleh Forum GenRe kepada PIK-R, dan juga tidak terlibat dalam proses penyusunan rencana kegiatan yang akan dilakukan baik oleh Forum GenRe, Duta GenRe, maupun PIK-R.

3. Penerapan (Aplikasi)

Dalam proses implementasi Program GenRe di Kota Surakarta, tahap penerapan atau aplikasi merupakan tahapan dinamis yang dipengaruhi oleh faktor-faktor baik internal maupun eksternal. Setelah melalui tahap interpretasi, program kerja yang dilaksanakan tidak selalu berjalan sesuai dengan perencanaan atau petunjuk pelaksanaan yang disepakati, melainkan disesuaikan dengan kondisi aktual di wilayah.

Pada tahap penerapan, DP3AP2KB tidak banyak bersinggungan langsung dengan sasaran kebijakan yakni remaja di Kota Surakarta, melainkan lebih banyak berkoordinasi dengan unit pelaksana dibawahnya untuk kemudian dilaksanakan oleh unit pelaksana tersebut. Dalam hal ini, unit pelaksana yang dimaksud yakni Forum GenRe dan Duta GenRe, serta dengan PKB.

Dalam tahap penerapan ini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan di Kota Surakarta, salah satunya adalah kegiatan sosialisasi. Sosialisasi menjadi kegiatan yang paling sering dilakukan dan melibatkan banyak *stakeholder* dalam pelaksanaannya. Sosialisasi dilakukan dengan PIK-R wilayah sebagai penyelenggara, kemudian mengundang Forum GenRe dan Duta GenRe sebagai pemateri, dan mengundang anggota PIK-R serta remaja setempat sebagai peserta. Selain mengundang Duta GenRe dan Forum GenRe, PIK-R, dalam hal ini PIK-R Joyotakan juga kerap mengundang pihak luar atau mitra seperti puskesmas, BNN, atau pihak lain. Sosialisasi ini biasanya dilakukan dengan frekuensi yang cukup sering yakni 2 hingga 4 kali dalam satu tahun, dan disesuaikan dengan anggaran yang diberikan oleh DP3AP2KB pada setiap PIK-R wilayah. Dalam sosialisasi ini selain diundang menjadi pemateri, Forum GenRe juga dilibatkan dalam proses perancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh PIK-R. Sosialisasi juga menjadi salah satu program utama yang dilakukan oleh Duta GenRe Surakarta.

Peserta yang menjadi sasaran kegiatan sosialisasi semestinya merupakan remaja umum di wilayah kelurahan, baik dari dalam (anggota) PIK-R maupun di luar PIK-R. Pada pelaksanaannya, seringkali PIK-R menjadi pihak penyelenggara dan sekaligus menjadi peserta dalam kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, seperti PIK-R yang masih baru, atau karena kurangnya antusiasme masyarakat atau remaja setempat. Selain itu, dalam melaksanakan sosialisasi, PIK-R Joyotakan juga mengalami hambatan terkait jumlah peserta. Namun hal ini telah berhasil teratasi setelah adanya reorganisasi. Setelah PIK-R menjadi penyelenggara sekaligus peserta dan mendapatkan materi serta pembekalan dari sosialisasi yang dilakukan, kemudian PIK-R memiliki tugas untuk menyebarkan materi yang diduplikasinya tersebut pada remaja lain di wilayahnya.

Selain mengadakan sosialisasi, PIK-R yang dalam hal ini PIK-R Joyotakan juga mengadakan beberapa kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan usia anak. Kegiatan tersebut yakni melakukan pencatatan dan pendataan terhadap remaja yang telah menikah di wilayahnya, serta melakukan advokasi.

Sedikit berbeda dengan PIK-R Joyotakan, PIK-R Cakra UNS mengemas kegiatan serupa dalam bentuk workshop atau pelatihan. Dalam

workshop ini PIK-R Cakra UNS menjadi penyelenggara dan peserta kegiatan, dengan Forum GenRe dan Duta GenRe sebagai pemateri. *Workshop* yang dilakukan dengan Forum GenRe dan Duta GenRe ini dilakukan dengan frekuensi yang cukup sering, hingga 5 sampai 6 kali dalam satu periode. Selain mengadakan *workshop*, PIK-R Cakra UNS juga memiliki beberapa program kerja lain yakni Halo PIK yang merupakan wadah konseling yang terdiri dari pendidik sebaya dan konselor sebaya (PSKS), serta mengadakan webinar dan membuat podcast. Selain itu, PIK-R Cakra UNS juga mengadakan advokasi melalui pembuatan artikel yang disebarluaskan di berbagai platform seperti di web atau sosial media, serta sedang berencana untuk membuat Komik terkait 8 substansi GenRe yang juga akan disebarluaskan.

Selanjutnya, dalam tahap aplikasi atau penerapan, *stakeholder* lain yakni Forum GenRe Surakarta juga memiliki program kerja lain selain sosialisasi sebagai kegiatan utama. Kegiatan tersebut yakni Pemberdayaan PIK, advokasi *online*, dan GGS yang langsung terjun ke masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatannya, Forum GenRe mengalami beberapa kendala atau hambatan. Salah satu hambatan yang dialaminya yakni birokrasi yang berbelit sehingga menyebabkan informasi yang sampai kepada Forum GenRe menjadi tertunda. Hal ini mengakibatkan Forum GenRe menjadi terkesan terburu-buru dalam melaksanakan tugasnya.

Sedikit berbeda dengan Forum GenRe dan PIK-R yang memiliki program kerja kontinu dari periode ke periode, Duta GenRe memiliki beberapa program kerja yang merupakan rancangan pribadinya yang diusung saat mendaftarkan diri sebagai Duta GenRe. IF sebagai Duta GenRe Kota Surakarta 2022 memiliki beberapa program kerja yakni Balsem (Iqbal bahas pesan film), Biopsi (Iqbal ngisi sosialisasi), Boosting (buat menu cegah stunting) dan Balita (bareng Iqbal berbagi cerita). Keempatnya tergabung dalam program kerja Ranting Gaharu (Gerakan Anti Stunting Jaga Harapan Indonesiaku).

Untuk program Biopsi atau Iqbal Ngisi Sosialisasi, IF selaku Duta GenRe tidak hanya menjadi pemateri dalam sosialisasi yang dibuat oleh PIK-R melainkan juga sosialisasi yang diinisiasi olehnya secara pribadi. Kemudian, IF juga melakukan program kerja Balita atau Bareng Iqbal Berbagi Cerita, yang merupakan media sosialisasi yang lebih kekinian dengan dikemas dalam bentuk *podcast* atau *talkshow*. Program kerja lain dalam Ranting Gaharu ialah Balsem atau Iqbal Bahas Pesan Film. Program kerja ini lebih berfokus pada pemberian edukasi melalui cara yang menyenangkan dan dekat dengan remaja saat ini.

Dalam melaksanakan program kerjanya, Duta GenRe juga mengalami beberapa kendala seperti menumpuknya konten yang harus disebar. Hal ini terjadi sebab banyak dari program kerjanya yang memanfaatkan media *online* sehingga harus banyak membuat konten dengan tenggat waktu yang cukup padat. Meski begitu, Iqbal dapat mengatasi permasalahan ini dengan membentuk tim media yang dapat membantunya.

Stakeholder selanjutnya yakni PKB, yang merupakan pendamping atau pembina dari PIK-R wilayah. Dalam tahap penerapan atau Program GenRe di Kota Surakarta, PKB lebih berperan sebagai pendamping PIK-R yang membina dan mengawasi, serta dalam beberapa kesempatan PKB juga turut mengisi atau memberikan materi dalam sosialisasi yang dilaksanakan. Selain itu, PKB juga berperan sebagai penghubung antara PIK-R dengan Forum GenRe atau PIK-R dengan DP3AP2KB, serta bertanggung jawab atas pelaporan kegiatan.

Berdasarkan hasil analisis pada tahap penerapan atau aplikasi kebijakan pada Program GenRe di Kota Surakarta, telah dapat dipetakan posisi masing-masing *stakeholder*. Dalam tahap penerapan ini, DP3AP2KB berperan sebagai *Context Setter* yang memiliki kepentingan yang rendah namun tetap memiliki pengaruh yang tinggi. DP3AP2KB memiliki kepentingan yang rendah sebab tidak terlibat langsung dalam tahapan penerapan, melainkan hanya menggerakkan unit dibawahnya yakni Forum GenRe, Duta GenRe, PKB, dan PIK-R. Namun DP3AP2KB tetap memiliki pengaruh yang tinggi sebab DP3AP2KB merupakan penanggung jawab tertinggi program GenRe di Kota Surakarta, sehingga keputusan yang diambilnya dapat mempengaruhi keberjalanan kegiatan.

Selanjutnya, dalam tahap penerapan atau aplikasi, Forum GenRe, Duta GenRe, dan PIK-R memiliki peran besar sebagai *Key Player* sebab memiliki kepentingan dan pengaruh yang besar dalam tahap penerapan atau aplikasi. Kepentingan dan pengaruh yang tinggi ini dapat dilihat dari kewenangan yang dimiliki masing-masing kelompok atau organisasi untuk dapat melaksanakan langsung kegiatan yang di racangnya. Dalam hal ini Forum GenRe, Duta GenRe, dan PIK-R memiliki peran besar sebagai inisiator kegiatan, penyelenggara atau pelaksana kegiatan, dan bahkan juga menjadi peserta dari kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan PKB dalam tahap penerapan atau aplikasi, berperan sebagai *Subject*, yang memiliki kepentingan yang tinggi namun memiliki pengaruh atau dampak yang rendah. Kepentingan yang tinggi ini terlihat dari PKB yang selalu melaksanakan tugasnya sebagai pembina PIK-R. PKB memastikan bahwa kegiatan PIK-R berjalan baik, menjadi pemateri dalam beberapa sosialisasi

yang diadakan, hingga membuat laporan pelaksanaan kegiatan. Meski begitu PKB memiliki pengaruh atau dampak yang rendah sebab dalam tahap penerapan ini PKB hanya mengambil peran sebagai pengisi atau pematери, dan menjadi pengawas kegiatan, serta tidak terlibat langsung sebagai penyelenggara kegiatan.

Penutup

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam proses implementasi Program GenRe di Kota Surakarta terdapat 5 stakeholders yang terlibat, yakni: DP3AP2KB, Forum GenRe Surakarta, Duta GenRe Surakarta, PIK-R, dan PKB/PLKB. Pada tahap pertama yakni pengorganisasian, DP3AP2KB sebagai penanggung jawab berperan sebagai Key Player. Sedangkan Forum GenRe, Duta GenRe, PIK-R dan PKB memiliki peran yang sama yakni sebagai Subject.

Pada tahapan interpretasi, DP3AP2KB masih berperan sebagai Key Player yang memastikan bahwa program kerja atau kegiatan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan arahan dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah, terutama dalam hal administrasi dan penganggaran. DP2AP2KB juga memiliki pengaruh yang besar, dimana DP3AP2KB berwenang untuk menyetujui, menolak, merevisi, memberikan arahan, dan menambahkan apabila rancangan kegiatan dirasa kurang sesuai. Dalam tahap ini, Forum GenRe, Duta GenRe, dan PIK-R berperan sebagai Subject. Selanjutnya, dalam tahap ini PKB berperan sebagai Crowd, sebab PKB hanya berperan sebagai penyalur atau penghubung antara DP3PA2KB dengan PIK-R di wilayah.

Pada tahap penerapan atau aplikasi, DP3AP2KB berperan sebagai Context Setter sebab dalam tahap ini DP3AP2KB hanya menggerakkan dan mendukung unit-unit yang ada dibawahnya. Forum GenRe, Duta GenRe, dan PIK-R dalam tahap penerapan memiliki peran besar sebagai Key Player. Dalam hal ini Forum GenRe, Duta GenRe, dan PIK-R memiliki peran besar sebagai inisiator kegiatan, penyelenggara atau pelaksana kegiatan, dan bahkan juga menjadi peserta dari kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan PKB dalam tahap penerapan atau aplikasi, berperan sebagai Subject

Referensi

- Abdussamad, H.Z (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar. CV Syakir Media Press
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat Bina Ketahanan Remaja (2012). Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIK R/M).

- Darvina, F. (2017). Implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) dalam rangka Penyiapan dan Perencanaan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja : Studi pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara.
- Giyartika, G., Nurhadi, N., & Yuhastina, Y. (2021). Menelisik Pencegahan Pernikahan Usia Anak di kota Surakarta. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 6(1), 39-54.
- Handoyo, E (2012). Kebijakan Publik. Semarang. Widya Karya.
- Hardani, dkk (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta. CV Pustaka Ilmu Group
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). Implementing public policy: Governance in theory and in practice. Sage.
- Jones, Charles O; Ricky Ismanto; Nashir Budiman. (1991). Pengantar kebijakan publik : (Public Policy) / Charles O. Jones; penerjemah, Ricky Istamto. Jakarta:: Rajawali,.
- Nugroho, D. A. (2016). PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011-2015 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Nugroho, R (2018). Public Policy (6). Jakarta. PT Elex Media Komputindo
- Pambudhi, R. (2022). Implementasi Program Generasi Berencana Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Cakra UNS dalam Upaya Pemenuhan Hak Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Kesehatan Reproduksi bagi Remaja di Kota Surakarta.
- Prabowo, D., & Rostyaningsih, D. (2019). Stakeholders Mapping in Overcoming Child Marriage Problems in Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4), 495-509.
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., ... & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of environmental management*, 90(5), 1933-1949.
- Riskiyah, H. Analisis Stakeholder Dalam Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Puskesmas Di Kabupaten Jember.
- Sachlan, E. S. M., Supriadi, O., & Arenawati, A. (2019). IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK DARI PERKAWINAN USIA DINI DI KECAMATAN SAJIRA KABUPATEN LEBAK (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Tanjung, M. I. (2022). Upaya duta generasi berencana Kabupaten Gresik dalam mengurangi perkawinan usia anak pada masa pandemi Covid-19 Perspektif Tujuan Hukum (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Widodo, M. L., Soekmadi, R., & Arifin, H. S. (2018). Analisis stakeholders dalam pengembangan ekowisata di taman nasional Betung Kerihun Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*

(Journal of Natural Resources and Environmental Management), 8(1), 55-61.

- Wijayanti, Z., Kismartini, K., & Sunu, R. (2022). KOLABORASI DALAM SOSIALISASI PROGRAM GENERASI BERENCANA PADA PELAKSANAAN PENDEWASAAN UMUR PERNIKAHAN. Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan, 5(2), 74-86.
- Yulianti, D. (2017). Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas. Jurnal Analisis Sosial Politik, 1(2), 93-108.